

## HUBUNGAN PERSEPSI KINERJA PEMERINTAHAN DENGAN KETERPILIHAN CALON PASANGAN PETAHANANA DI PILKADA SALATIGA 2017

Oleh

Suwardi<sup>1</sup> dan Aris Tri Haryanto<sup>2</sup>  
Staf Pengajar Fisip Universitas Slamet Riyadi Surakarta

### Abstract

*The 2017 Major Election of Salatiga concluded that the number of earned votes for current Major and Vice-Major Yulianto – Muhammad Haris (Yaris) surpass the earned votes for Agus Rudianto – Dance Palit Ishak (Rudal). As the incumbent, Yaris were much favored politically. Strategic incumbent variable is a chance to convince public over their government performance. The level of public satisfaction over the performance of Major Yulianto could be the main modal to build personal political variable such as popularity, acceptability and electability.*

*This Research use survey data that conducted by the researcher while the 2017 Major Election of Salatiga is on process. The survey data then analyzed using determination approach with the result of the 2017 Major Election of Salatiga that being held on 15 February 2017. Aspect of the method used in this survey are using sample frame of Permanent voters list (DPT). The technique used to get the sample are cuplikan random sampling based on the survey location. The survey conducted over 96 TLS with 768 reponden. This survey has 3,5% margin error with significance level of 95%.*

*Yaris perceived to have good governing performance of 77%. This incumbent win the election with 50,5% earned votes. At the unit level data analysis, 23 kelurahan indicates the distribution are varies. Although there is a relation between good governing performance and the incumbent to be elected, there are many other variable that affect the result.*

**Key word:** local election, Salatiga, incumbent, performance, political personal

---

### Pendahuluan

Gelaran pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak di Indonesia telah berlangsung dua periode. Periode pertama pilkada serentak dilangsungkan pada Februari 2015. Sedangkan pilkada serentak kedua dilaksanakan selang dua tahun berikutnya di 2017. Secara umum penyelenggarakat hajatan pemilu local tersebut berjalan lancar dan aman, walaupun tentu ada riak – riak ketidak puasan pada diri pasangan kontestan yang tidak terpilih beserta para pendukungnya.

Dari kedua pilkada serentak tersebut banyak diikuti oleh pasangan yang selama ini dikenal dengan sebutan populer sebagai pasangan *incumbent*. Istilah yang kemudian dicarikan padanan kata dalam bahasa Indonesia “petahanan”. Penyebutan pasangan petahana dirasa lebih pas dibanding penyebutan pasangan *incumbent* dalam kosa kata bahasa Inggris.

Pasangan petahana untuk menandai keberadaan peserta atau kontestan pilkada yang pada saat dilangsungkannya pilkada baru saja usai menjabat atau masih dalam masa jabatan sebagai kepala daerah atau

wakil kepala daerah. Penyebutan petahana berlaku untuk calon kepala daerah dan atau calon wakil kepala daerah.

Berdasarkan pengalaman pilkada secara langsung dipilih oleh rakyat, dapat hampir pasti kepala daerah atau wakil kepala daerah akan maju kembali pada periode jabatan berikutnya, manakala yang bersangkutan memenuhi persyaratan undang – undang. Kepala daerah yang dimaksud adalah kepala daerah atau wakil kepala daerah yang baru satu periode menduduki jabatan yang sama. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah menduduki jabatan yang sama selama dua periode berdasarkan peraturan perundang – undangan tidak dibolehkan maju pada pemilu jabatan yang sama periode berikutnya. Diantara pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017, pilkada Kota Salatiga adalah salah satu diantara penyelenggaraan pilkada yang diikuti oleh peserta dengan stutus pasangan petahana.

Dua pasangan bersaing merebutkan jabatan wali kota wakil wali kota salatiga periode 2017 – 2022 adalah pasangan Yulianto – Muhammad Haris (Yaris) dan pasangan Agus Rudianto – Dance palit Iskhah (Rudi – Dance). Yaris adalah

pasangan petahana. Pasangan ini telah menjabat sebagai wali kota – wakil wali kota Salatiga pada periode sebelumnya, yaitu periode 2011 – 2016. Sedangkan Rudi – Dance adalah lebih tepat dianggap sebagai pasangan penantang, walaupun sebelum dicalonkan sebagai calon wali kota Agus Rudianto sempat menjabat sebagai PLT. Wali Kota Salatiga kurang lebih 3 bulan.

Fenomena banyaknya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi kontestan petahana tidak dapat dipungkiri sebagai akibat dari posisi politik yang lebih diuntungkan dibanding dengan pasangan baru yang belum pernah menjabat dalam jabatan tersebut. *Political personal* merupakan tolak ukur kekuatan politik kontestan terdiri dari *popularity*, *acceptability* dan *electability*. Pasisi jabatan yang ada pada pasangan petahana lebih diuntungkan.

Selama lima tahun menjalankan pemerintahan kepala daerah memiliki kesempatan luas untuk memperkenalkan diri mereka kepada seluruh masyarakat. Hal ini memungkinkan dirinya untuk dapat kenal secara luas. Berdasarkan survey yang banyak dilakukan penulis, rata – rata angka popularitas kontestan petahan berada pada kisaran lebih dari 70%. Bahkan untuk kawasan perkotaan angka popularitasnya mencapai hampir 100%. Semua pemilih mengenai sang kepala daerahnya masing – masing.

*Acceptability* dipahami sebagai penilaian atas kemampuan dari kontestan untuk menduduki jabatan yang sedang dikontestasikan. Selama menjabat kepala daerah memiliki waktu yang panjang untuk membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan dalam menjalankan roda kepemimpinan dan pemerintah. Menjalang akhir masa jabatannya kepala daerah yang hendak maju dalam pilkada akan semakin gencar menyakinkan masyarakat bahwa diri pantas untuk menduduki jabatan kepala daerah pada periode berikutnya.

Sedangkan aspek *electability* atau keterpilihan merupakan *resultante* dari berbagai variabel lainnya. Secara teoritis sikap politik dan pilihan politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai variabel. Namun demikian secara teoritis pemilih memiliki penilaian atas diri kontestan positif apabila mengenalinya (*popularity*). Setelah kontestan dipandang *acceptable* oleh yang

mengenal berujung pada pilihan. Memiliki elektabilitas yang baik.

Kesamaan idiologi antara pemilih dengan partai politik banyak ditemukan dalam berbagai kasus pemilihan umum. Pemilih akan mengidentifikasi partai politik sesuai dengan identitas dirinya. Namun demikian penyamaan diri dan partai politik itu bukan merupakan variabel tunggal. Terdapat factor – factor lainnya yang mendorong pilihan terhadap partai politik. Faktor tersebut lebih pada isu – isu citra dan persepsi terhadap kandidat melalui paster. Diluar itun situasi sosial yang sedang trend memiliki pengaruh penting terhadap kemenangan kontestan (Campbel; 1998)

Pendapat Cambel (1998) tersebut dikuatkan oleh Hugh A. Bone & Austin Ranney (2000). Tdak hanya kesamaan pemilih dan partai politik yang mempengaruhi perilaku memilih, tetapi perilaku pemilih juga ditentukan oleh isu dan orientasi terhadap kandidat. Hal ini lebih penting disbanding persoalan kepartaian dalam menentukan pilihan pemilih. Faktanya kemenangan pemilu banyak ditentukan oleh factor figure dan popularitasnya.

Berdasarkan pendapat tersebut, pada banyak pemilukada menunjukkan faktor figure berpengaruh terhadap keterpilihan. Kontestasi pilkada lebih menekankan orang, karena pemilih memilih orang bukan partai politik. Berbagai survey yang banyak dilakukan oleh lembaga – lembaga survey di Indonesia atas pelaksanaan gelaran pilkada baik kabupaten ataupun kota menunjukkan bahwa bahwa pengenalan kontestan merupakan factor yang sangat berpengaruh atas kemenangan kemenangan kandidat dalam pilkada. Pada banyak kasus yang lain tidak sedikit kontestan yang diusung oleh partai – partai besar atau kumpulan partai – partai sehingga jumlahnya menjadi besar kalah oleh kandidat yang diusung oleh sejumlah partai yang tidak moyoritas berdasarkan hasil pemilu terakhir.

Penelitian Fitriyah, dkk (2011) di Pilkada Kabupaten Batang menguji variable - variabel yang berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan calon kepala daerah. Variabel – variabel tersebut adalah sosiologis, psikologis dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable figur kontestan berpengaruh signifikan pada elektabilitas yang menentukan kemenangan terjadi di pilkada Batang tahun 2011.

Sedangkan variable sosiologis, variabel psikologis serta variabel ekonomi juga memiliki pengaruh tetapi tidak terlalu besar. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dalam pemilihan umum bagi – bagi uang dan atau sembako atau barang lainnya yang kemudian dikenal sebagai istilah monay politic adalah sesuai yang wajar. Hanya sedikit pemilih pemilih yang terang – terangan tidak menginginkan politik uang. Akan tetapi uang pada kenyataannya bukanlah faktor utama sebagai pertimbangan dalam memilih seorang calon.

Mulyana (2000) mengidentifikasi prinsip persepsi publik yang menentukan sikap politik dan pilihan politik terhadap kontestan pemilu. Terdapat lima prinsip yang perlu diperhatikan dalam memahami persepsi social terkait dengan sikap politik pemilih, yaitu (1) persepsi berdasarkan pengalaman, (2) bersepsi bersifat selektif; (3) persepsi bersifat dugaan; (4) persepsi bersifat evaluative; dan (5) persepsi bersifat kontekstual. Kajian terhadap prinsip persepsi social tersebut disimpulkan bahwa persepsi dapat terjadi dikarenakan pengalaman, seleksi, evaluatif kinerja seseorang terhadap calon petahana (*incumbent*), yang dapat memengaruhi perilaku partisipasi masyarakat dalam pilkada. Pendapat ini disimpulkan bahwa elektabilitas atau keterpilihan kontestan pilkada yang diikuti oleh pasangan petahanan tidak lepas dari persepsi kinerja pemerintahan yang telah mereka jalankan selama lima tahun periode kepemimpinannya.

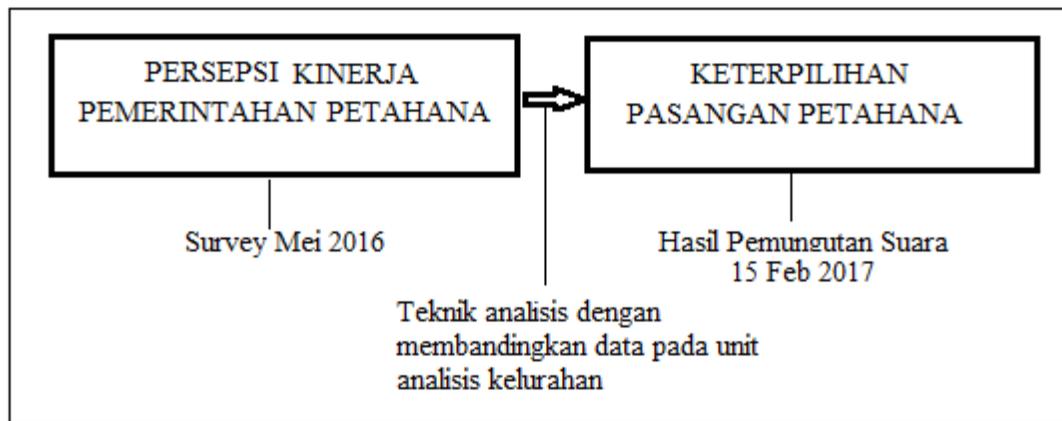
Berangkat dari pendapat Campbel (1998) dan Hugh A. Bone & Austin Ranney (2000) penelitian ini berbeda dengan penelitian Mulyana (2000); Fitriyah, dkk (2011). Penelitian ini mengembangkan analisis lebih spesifik atas hubungan anatar persepsi kinerja pemerintahan terhadap elektabilitas pasangan petahana di pilkada Salatiga 2017. Analisis dan kerangka metode penelitian memanfaatkan data survey yang dilakukan pada proses pilkada 2017 dengan hasil pemungutan suara dan Penetapan hasil akhir pilkada Kota Salatiga.

Penelitian ini memanfaatkan data survey yang dilakukan peneliti pada saat proses pilkada Kota Salatiga 2017. Hal ini dimaksudkan agar data – data survey yang dimiliki peneliti yang tidak dipublikasikan karena posisi peneliti sebagai konsultan ketika itu dapat terpublikasi dengan baik melalui penelitian ini. Data survey yang ada kemudian dianalisis menggunakan pendekatan determinasi dengan hasil pemungutan suara pilkada Salatiga yang berlangsung pada 15 Februari 2017.

## **Metode**

Variabel strategis dari *political personal* calon petahana adalah kesempatannya menyakinkan public atas kinerja pemerintahannya. Premis yang bisa diajukan dalam memahami variable *political personal* petahana berhubungan dengan persepsi positif atas kinerja pemerintahan yang telah dicapai. Semakin tinggi persepsi positif terhadap kinerja pemerintahan calon kepala daerah petahana semakin tinggi angka keterpilihannya. Pilkada Salatiga 2017 menempatkan Yulianto sebagai bakal calon walikota petahana. Keterpilihan Yulianto dan hasil pemungutan suara 15 Februari 2017 mengungguli calon walikota penantang.

Pengukuran persepsi kinerja pemerintahan di dasarkan pada aspek pengukuran non final atau yang berhubungan dengan pelayanan public. Terdapat 11 aspek yang dijadikan obyek pengukuran kinerja pemerintahan Kota Salatiga, antara lain: (1) Kesehatan, oleh Puskesmas – Rumah Sakit; (2) Pendidikan; (3) Layanan pemerintahan kelurahan – kecamatan; (4) pengelolaan kebersihan – sampah; (5) penataan pasar tradisional; (6) infrastruktur jalan; (7) pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme; (8) penataan pedagang kaki lima; (9) dukungan terhadap usaha menengah kecil dan mikro; (10) pengendalian harga kebutuhan pokok – inflasi daerah; (11) Ketertipan dan keamanan.



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran Penelitian

Populasi dan sampel yang dimaksudkan bagian ini adalah populasi dan sampel yang peneliti gunakan ketika melakukan survey yang salah satunya untuk memperoleh data tentang persepsi kinerja pemerintahan Wali Kota Yulianto. Populasi adalah penduduk dewasa Kota Salatiga. Survey menggunakan kerangka sampling daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu legislative 2014. Sampling menggunakan tehnik “cuplikan” random sampling: (1) Titik Lokasi Survey (TLS) ditentukan sebanyak 92 TLS diipih secara purposive dengan memperhatikan tingkat penyebaran wilayah; (2) DPT pada TPS – TPS terpilih sebagai TLS diacak guna menentukan Responden. (3) Tiap TLS ditentukan sebanyak 6 responden komulatif. Sampel survey berjumlah 552 responden. *Margin error* pada level 5% untuk keseluruhan sampel pada tingkat signifikansi 95%.

Penelitian ini menggunakan instrumen data berupa kuisioner tertutup. Sedangkan tehnik pengambilan datanya dilakukan dengan mendatangi responden dan mengajukan pertanyaan sesuai dengan kuisioner yang telah ditetapkan. Unit analisis penelitian ini adalah kelurahan di wilayah Kota Salatiga.

Data persepsi kinerja pemerintahan diperoleh dari data survey yang dilakukan

pada bulan Mei 2016. Sedangkan data keterpilihan pasangan petahana diperoleh dari hasil pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017. Analisis hubungan antara persepsi kinerja pemerintahan dengan keterpilihan pasangan petahana dilakukan dengan membandingkan data hasil survey dengan data hasil pemungutan suara di masing – masing kelurahan.

Kategorisasi hasil pemungutan suara Yaris terdiri dari dua kategori (menang dan kalah) didasarkan pada hasil perhitungan suara pilkada Salatiga 2017 atas pasangan Yulianto – Moh. Haris. Sedangkan kategori persentase persepsi baik pemerintahan Wali Kota Yulianto terdiri dari tiga kategori (tinggi, sedang dan rendah) didasarkan pada pengelompokan dengan menggunakan perhitungan range interval hasil survey.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengukuran kinerja pemerintahan dilakukan dengan mengukur hasil pekerjaan. Terdapat dua obyek pengukuran kinerja pemerintahan, yaitu output dan outcome. Output berhubungan dengan kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan, sedangkan outcome pengukuran dampak aktivitas pemerintahan yang dirasakan oleh masyarakat (Mardiasmo, 2002).

**Tabel 1 Ringkasan data survey dan kesimpulan persepsi kinerja**

Indikator Kinerja	Penialain Responden						Kesimpulan
	SP	P	BP	TP	STP	TT	
Pelayanan Pendidikan	5%	75%	14%	1%	0%	7%	Sangat Memuaskan
Pelayanan Kesehatan	4%	73%	19%	1%	0%	4%	Memuaskan
Sarana dan prasara perkotaan – Infrastruktur	1%	66%	29%	0%	0%	3%	Cukup memuaskan

Indikator Kinerja	Penilaian Responden						Kesimpulan
	SP	P	BP	TP	STP	TT	
Pelayanan kantor kecamatan dan kelurahan	2%	60%	31%	2%	0%	5%	Cukup memuaskan
Pengelolaan sampah dan kebersihan	2%	59%	27%	2%	1%	9%	Cukup memuaskan
Penataan pasar tradisional	1%	52%	34%	7%	1%	6%	Cukup memuaskan
Pemberantasan KKN	0%	36%	32%	10%	1%	1%	Tidak memuaskan
Penataan PKL	1%	45%	30%	2%	0%	22%	Kurang memuaskan
Pembinaan UMKM	3%	45%	29%	4%	1%	19%	Kurang memuaskan
Pengendalian harga kebutuhan pokok – inflasi	0%	41%	33%	6%	0%	20%	Kurang memuaskan
Pengelolaan Ketertipan dan keamanan	2%	76%	18%	1%	0%	4%	Memuaskan

Sumber: Data primer (2016)

**Keterangan:**

**SP = Sangat Memuaskan; P = Memuaskan; BP = Belum Memuaskan;**

**STP = Sangat Tidak Memuaskan; TT = Tidak Tahu**

**Kesimpulan** atas hasil survey didasarkan pada prosentase jawaban **SP (Sangat Puas)** dan **P (Puas)** dengan threshold 50% untuk kategori “**cukup memuaskan**”

Penelitian ini melakukan pengukuran kinerja dengan pendekatan persepsi, yaitu sikap atau pendapat sebagai respon penilaian atas suatu stimulus. Sarwono (2002) menjelaskan persepsi positif ialah prasangka positif. Orang memiliki tendensi menyukai atau mendukung sesuatu, sedangkan persepsi negative dapat dimaknai sebagai prasangka negatif dimana orang memiliki kecenderungan tidak menyukai atau tidak mendukung sesuatu. Persepsi kinerja pemerintahan dalam penelitian ini dimaknai sebagai sikap penilaian masyarakat terhadap aktivitas pemerintahan wali kota – wakil

walikota Yulianto – Haris tahun 2011 – 2015 dalam menyelenggarakan pelayanan.

Keseluruhan indicator survey persepsi terhadap pemerintahan wali kota – wakil wali kota Yulianto – Haris periode 2011 – 2016, apabila dirangkum menjadi satu, dan kesimpulan penilaian, ditampilkan table 1

Setelah dipaparkan, data penelitian persepsi masyarakat terhadap sebelas bidang, peneliti kemudian menanyakan secara umum persepsi masyarakat secara umum terhadap pemerintahan Kota Salatiga yang dipimpin oleh Wali Kota Yulianto.

**Tabel 2 Distribusi persentase persepsi positif kinerja incumbent berdasarkan wilayah kelurahan**

Kelurahan	Persepsi positif kinerja Incumbent		Jumlah Resp Total	Kategori Persepsi
	n	%		
Blontongan	26	72%	36	Sedang
Bugel	15	83%	18	Sedang
Cebongan	22	92%	24	Tinggi
Dukuh	46	96%	48	Tinggi
Gendongan	21	88%	24	Tinggi
Kalibening	10	83%	12	Sedang
Kalicacing	21	70%	30	Sedang
Kauman kidul	17	94%	18	Tinggi
Kecandran	27	90%	30	Tinggi
Kumpulrejo	21	88%	24	Tinggi
Kutowinangun Lor	33	55%	60	Rendah
Kutowinangun kidul	30	50%	60	Rendah

Kelurahan	Persepsi positif kinerja <i>Incumbent</i>		Jumlah Resp	Kategori Persepsi
	n	%	Total	
Ledok	21	58%	36	Rendah
Mangunsari	39	65%	60	Sedang
Noborejo	22	92%	24	Tinggi
Pulutan	15	83%	18	Tinggi
Randuacir	24	100%	24	Tinggi
Salatiga	38	90%	42	Tinggi
Sidorejo kidul	23	96%	24	Tinggi
Sidorejo lor	30	83%	36	Sedang
Tangkir lor	21	88%	24	Tinggi
Tangkir tengah	22	92%	24	Tinggi
Tegalrejo	36	100%	36	Tinggi
Jumlah	565	77%	732	Sedang

Sumber: data primer

Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah sebagai berikut: “penilaian anda secara umum terhadap pemerintahan Kota Salatiga yang dipimpin oleh Wali Kota Yulianto selama lima tahun terakhir?” Jawaban yang disediakan: (1) Sangat baik; (2) Baik; (3) Kurang Baik; (4) Tidak Baik; (5) Sangat Tidak Baik; (6) Tidak Tahu / Tidak Jawab.

Guna menentukan kategori persentase persepsi baik pemerintahan, ditentukan terlebih dahulu interval nilai, dengan rumus sebagai berikut: Berdasarkan nilai interval 16 maka kategori persepsi baik pemerintahan Wali Kota Yulianto, adalah: Tinggi (50% - 66%); Sedang (67% - 83%) dan Tinggi (84% - 100%) Sedang

**Tabel 3 Distribusi Perbandingan Keunggulan Suara Pemilih Pasangan Rudi – Dance vs Yulianto – Haris**

Kelurahan	Perolehan PS Rudi -Dance		Perolehan PS Yaris		Suara Sah	Keterangan Unggul Raihan Suara
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Blotongan	3523	50.80%	49.20%	3418	6941	Rudi – Dance
Bugel	735	40.00%	60.00%	1103	1838	Yaris
Cebongan	1211	42.70%	57.30%	1624	2835	Yaris
Dukuh	3247	45.10%	54.90%	3954	7201	Yaris
Gedongan	1458	50.30%	49.70%	1439	2897	Rudi – Dance
Kalibening	280	24.90%	75.10%	846	1126	Yaris
Kalicacing	2295	65.90%	34.10%	1185	3480	Rudi – Dance
Kauman Kidul	1089	44.80%	55.20%	1340	2429	Yaris
Kecandran	2294	61.00%	39.00%	1465	3759	Rudi – Dance
Kumpulrejo	2586	54.40%	45.60%	2164	4750	Rudi – Dance
Kutawinangon Lor	3401	46.90%	53.10%	3856	7257	Yaris
Kutawinangun Kidul	2544	54.40%	45.60%	2134	4678	Rudi – Dance
Ledok	2868	48.20%	51.80%	3080	5948	Yaris
Mangunsari	5501	57.10%	42.90%	4134	9635	Rudi – Dance
Noborejo	1430	36.90%	63.10%	2442	3872	Yaris
Pulutan	1194	47.10%	52.90%	1340	2534	Yaris
Randuacir	1939	53.70%	46.30%	1674	3613	Rudi – Dance
Salatiga	4086	50.90%	49.10%	3948	8034	Rudi – Dance
Sidorejo Kidul	1584	43.80%	56.20%	2029	3613	Yaris
Sidorejo Lor	3157	41.70%	58.30%	4419	7576	Yaris
Tegalrejo	3531	59.00%	41.00%	2450	5981	Rudi – Dance

Kelurahan	Perolehan PS Rudi -Dance		Perolehan PS Yaris		Suara Sah	Keterangan Unggul Raihan Suara
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Tingkir Lor	997	38.50%	61.50%	1593	2590	Yaris
Tingkir Tengah	1112	41.90%	58.10%	1539	2651	Yaris
<b>Jumlah</b>	<b>52062</b>	<b>49.50%</b>	<b>50.50%</b>	<b>53176</b>	<b>105238</b>	<b>YARIS</b>

Sumber: Data primer (2017)

Pada saat survey persepsi kinerja pemerintahan ini dilakukan dan hasilnya telah dipaparkan), survey juga menanyakan kepada responden tentang pilihan politik responden atas pasangan calon yang disimulasikan pada saat survey ini dilakukan. Pertanyaan survey berusaha menggali data *snapshoots electability* pasangan calon. Yang dimaksud *snapshoots electability* pilihan pemilih atas pasangan calon pada saat survey dilakukan. Data ini memungkinkan terjadi perubahan seiring dengan perjalanan waktu sebagai bentuk dinamika politik yang terjadi. Imbasnya terjadi pada perubahan pilihan pemilih.

Pilkada Kota Salatiga 2017 partisipasi pemilih mencapai 82,8%. Angka ini lebih tinggi dibanding angka partisipasi Pilkada serentak secara nasional 78,6%. Jika dilihat dari sisi gender, angka partisipasi perempuan (85,40%) lebih tinggi dibanding angka partisipasi laki – laki (81,40%)

Pemungutan suara Pilkada serentak 2017 dilaksanakan berbarengan di seluruh Indonesia, yaitu pada tanggal 15 Februari 2017. Berdasarkan hasil perhitungan resmi KPU Kota Salatiga tercatat terdapat 105.238 suara sah. Distribusi suara sah masing – masing pasangan: (1) Rudi – Dance meraih 52.062 atau 49,5%; dan (2) Yulianto – Haris meraih **53.176** atau 50,5%. Dengan demikian Pasangan Yulianto – Muhammad Haris ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Kota Salatiga 2017.

Perolehan kedua pasangan ini hanya beda tipis  $\pm 1\%$ . Hal ini memungkinkan pasangan yang kalah memiliki kesempatan untuk melakukan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Proses selanjutnya ternyata penetapan pemenang adalah pasangan nomor urut dua. Sehingga Yulianto dan Mohammad haris dilanjut menjadi wali kota wan wakil wali kota untuk jabatan periode kedua, tahun 2017 – 2022.

Tabel 4 Distribusi Data Kategori Elektabilitas Yulianto – Hasil dengan

**Tabel 4. Persepsi Positif Kinerja *Incumbent***

Kelurahan	Kategori Elektabilitas PS YARIS	Kategori Persepsi Kinerja <i>Incumbent</i>	
		Persentase	Kategori
Blotongan	Kalah	Sedang	72%
Bugel	Menang	Sedang	83%
Cebongan	Menang	Tinggi	92%
Dukuh	Menang	Tinggi	96%
Gedongan	Kalah	Tinggi	88%
Kalibening	Menang	Sedang	83%
Kalicacing	Kalah	Sedang	70%
Kauman Kidul	Menang	Tinggi	94%
Kecandran	Kalah	Tinggi	90%
Kumpulrejo	Kalah	Tinggi	88%
Kutawinangon Lor	Menang	Rendah	55%
Kutawinangun Kidul	Kalah	Rendah	50%
Ledok	Menang	Rendah	58%
Mangunsari	Kalah	Sedang	65%
Noborejo	Menang	Tinggi	92%
Pulutan	Menang	Tinggi	83%
Randuacir	Kalah	Tinggi	100%
Salatiga	Kalah	Tinggi	90%
Sidorejo Kidul	Menang	Tinggi	96%

Kelurahan	Kategori Elektabilitas PS YARIS	Kategori Persepsi Kinerja <i>Incumbent</i>	
		Persentase	Kategori
Sidorejo Lor	Menang	Sedang	83%
Tegalrejo	Kalah	Tinggi	88%
Tingkir Lor	Menang	Tinggi	92%
Tingkir Tengah	Menang	Tinggi	100%
Kota Salatiga	Menang	Sedang	77%

Sumber: KPU Kota Salatiga (diolah)

Sebagaimana dijelaskan, unit analisis penelitian ini adalah kelurahan. Teknik analisis menggunakan comparasi data hasil pilkada Kota Salatiga 2017 per kelurahan untuk diperbandingkan dengan hasil survey persepsi kinerja pemerintahan wali kota Yulianto yang dilakukan sebelumnya. Ada jeda perbedaan waktu atau *time frame* antara hasil perhitungan perolehan suara pemilih sah dengan pelaksanaan survey persepsi. Hasil perhitungan suara atau data elektabilitas didasarkan pada perhitungan tanggal pelaksanaan pemungutan suara, yaitu 15 Februari 2017. Sedangkan data survey dilaksanakan pada bulan Juni 2015. Artinya ada jeda waktu  $\pm$  6 bulan. Menurut hemat peneliti hal ini tidak terlalu mengganggu karena persepsi terhadap suatu obyek dalam hal ini adalah persepsi public terhadap kinerja pemerintahan wali kota Yulianto tidak mengalami pergeseran signifikan dengan adanya jeda waktu tersebut.

Wali Kota Yulianto berdasarkan hasil pemungutan suara 15 Februari 2017 terdistribusi di 23 kelurahan. Raihan suara pemilih tersebut kemudian ditransformasikan kedalam dua kategori, yaitu: (1) kalah dan (2) menang. Berdasarkan kategori perolehan suara kategori kalah dan menang di 23 kelurahan, maka pasangan Yulianto – Haris menang di 13 kelurahan dan kalah di 10 kelurahan lainnya.

Data hasil survey persepsi kinerja pemerintahan Wali Kota Yulianto, ditransformasikan kedalam tiga kategori, yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. (1) Rendah: 10% - 36%; (2) Sedang 37% - 62%; dan (3) Tinggi: 63% - 89%. Dari pengkategorian data persepsi kinerja, distribusinya: (1) Persepsi kinerja tinggi 14 kelurahan; (2) persepsi kinerja sedang 9 kelurahan; dan (3) Persepsi kinerja rendah 3 kelurahan.

**Tabel 5 Distribusi data *cross table* Kategori Elektabilitas dengan Persepsi Kinerja**

Kategori Elektabilitas Walikota Yulianto	Kategori Persentase Persepsi Baik Pemerintahan Wali Kota Yulianto			Jumlah
	Baik	Sedang	Rendah	
Menang	8	3	2	13
Kalah	6	3	1	10
Jumlah	14	6	3	23

Sumber: Pengolahan data penelitian (2017)

Tidak semua persepsi kinerja baik wali kota Yulianto diikuti dengan kemenangan pada unit analisis kelurahan. Begitu juga sebaliknya, tidak semua persepsi kinerja rendah diikuti dengan kekalahan, Dari data *cross table* dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Empat belas kelurahan yang mempersepsikan kinerja pemerintahan wali kota Yulianto baik, delapan kelurahan pemungutan suara dimenangkan oleh Yulianto, sedangkan 6 kelurahan lainnya Yulianto kalah. Persepsi kinerja baik diikuti oleh kemenangan sebesar 60%, selebihnya

40% persepsi kinerja pemerintahan baik tidak diikuti kemenangan pilkada; (2) Enam kelurahan yang mempersepsikan kinerja pemerintahan Wali Kota Yulianto Sedang terbelah jadi dua, 3 kelurahan (50%) diikuti dengan kemenangan Yulianto, dan 3 kelurahan lainnya (50%) Yulianto Kalah; (3) Tiga kelurahan yang mempersepsikan kinerja pemerintahan Wali Kota Yulianto rendah, 2 kelurahan menang (66%) dan 1 kelurahan kalah (34%).

## Penutup

Persepsi positif kinerja pemerintahan *Incumbent* memang memiliki kontribusi terhadap elektabilitas, namun tidak satu – satunya. Karena itu bagi pasangan *incumbent* seharusnya memperhatikan *variable – variable* lain dalam usaha mempertahankan elektabilitas guna memperoleh jabatan politik periode berikutnya

Penelitian ini butuh penyempurnaan metodologi dalam hal perhitungan statistik hubungan atau *correlation* antara *variable* persepsi positif kinerja dengan keterpilihan *incumbent*. Mencermati hubungan melalui data kualitatif sekiranya mengandung kelemahan.

#### Daftar Pustaka

- Alfian, 2011, Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta.
- Arifin, Zainal. 2011. Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subir. 2003. *Keuangan Negara dan Kebijakan Utang Luar Negeri*. PT Grafindo Persada: Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Eriyanto, 1999, Metodologi Polling, Memberdayakan Suara Rakyat, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Fitriyah, dkk, 2011, Faktor Determinan Kemenangan Kandidat Pada Pemilu Kabupaten Batang 2011 Universitas Diponegoro Semarang.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- LAN (Lembaga Administrasi Negara). *AKIP dan Pengukuran Kinerja*. Edisi Tahun 2008.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta.
- Mulyana, Deddy. 2000. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nirzawan. 2001. *Tinjauan Umum terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. UPP YKPN: Yogyakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. PT Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Adman Nursal, “*Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bone, HA & Ranney, A : *Politics and Voters*, New York:McGraw-Hill Company, 1981
- Firmanzah, 2007, *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Purwodarminto, 1990, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Robertson, D, *Dictionary of Politics*, Penguin Books, London, 2000
- Robbins, Stephen P, 2003. Perilaku Organisasi, Jilid 2, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Sarwono, SW (2002), Individu dan teori – teori psikologi social, balai Pustaka, Jakarta.
- Slameto (2010), Belajar dan factor – factor yang mempengaruhi, Reneka Cipta, Jakarta
- Yuwana, 2004. Analisa Kemampuan Laba dan Arus Kas Operasi dalam Memprediksi Arus Kas Operasi Masa Depan. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra. Semarang
- Wagner, John A, & John R. Hollenbeck, 1995, *Management of Organization behavior*, Second edition, New Jersey, Printice - Hall, Inc.
- UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 4 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.